


Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web

Heru Wirawan Wahid^{a,1,*}, Harlinda^{a,2}, Syahrul Mubarak^{a,3}

^a Program Studi Teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Makassar, 90231, Indonesia

¹ heruwirawan999@umi.ac.id; ² hj.linda@yahoo.com; ³ syahrul.mubarak@umi.ac.id
*corresponding author

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 14 – 05 – 2020 Direvisi : 23 – 05 – 2020 Diterbitkan : 30 – 05 – 2020	Saat ini proses Musrenbang di Desa Baebunta dilakukan dengan mengambil data dari tiap dusun, lalu data tersebut akan di catat ke dalam pembukuan yang masih manual, akan tetapi hal itu belum merupakan solusi yang terbaik karena petugas masih kesulitan dalam mengetahui informasi program kerja yang akan dimasukkan dalam proses musrenbang dalam bentuk yang lengkap. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Web yang dapat digunakan untuk penataan data program kerja setiap dusun yang akan dihadapkan dalam forum musrenbang di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Website ini digunakan untuk menampung rencana program kerja dari setiap dusun yang akan dihadapkan dalam forum musrenbang tingkatan Desa agar dapat menjadi acuan untuk menentukan program kerja prioritas yang akan di masukkan dalam Musrenbang Kecamatan. dan informasi mengenai program kerja di Desa Baebunta dapat tersampaikan atau diinformasikan kepada masyarakat agar terciptanya transparansi dalam pengelolaan program kerja yang sedang berlangsung.
Kata Kunci: Musrenbang Desa Baebunta Program Kerja	
	This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki [1], [2]. Kini Undang-Undang tersebut telah berkembang dan pecah menjadi dua, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [3], [4]. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan harus berjalan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa.

Pembangunan merupakan proses yang diawali dengan perencanaan, keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pemerintahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya [5]. Perencanaan (Musrenbang) akan menunjukkan arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dalam periode tertentu [6]. Dengan perencanaan, semua kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor memiliki target yang jelas dan terukur [7], [8]. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan, proses Musrenbang merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

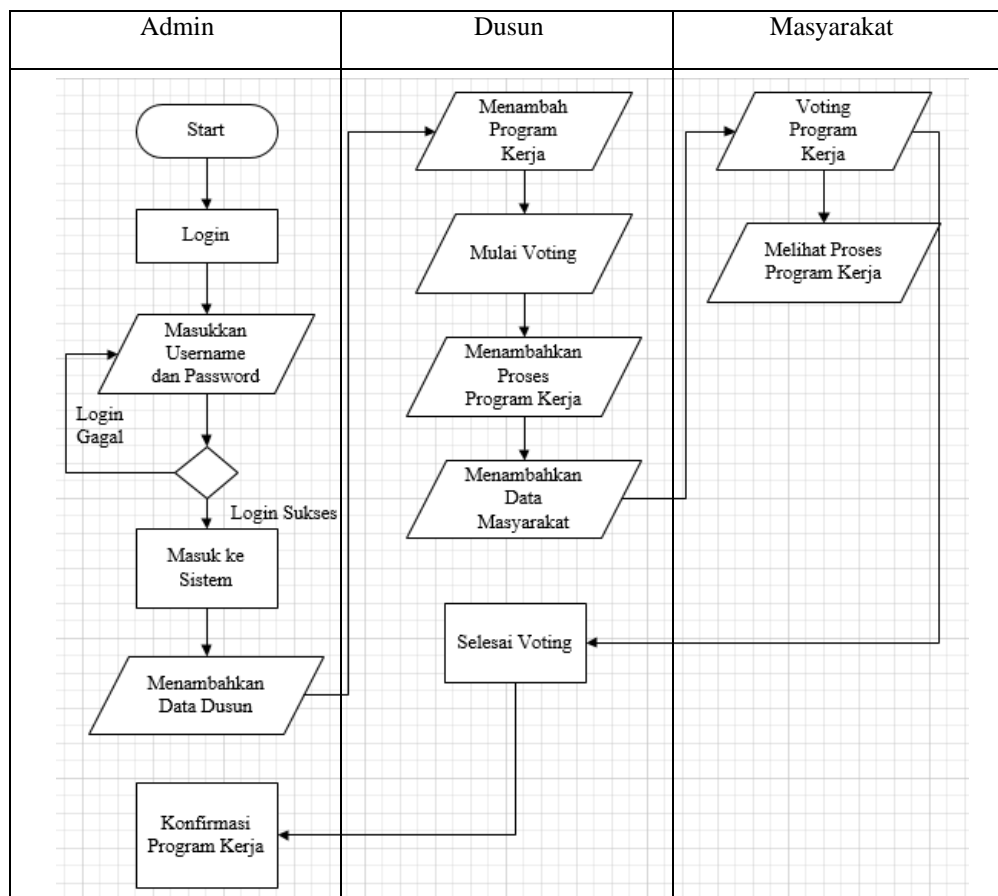
Tujuan diadakannya Musrenbang di tingkatan Desa Baebunta yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat [9] yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun sumber pendanaan lainnya [8]. Musrenbang yang dilakukan pada setiap tingkatan masih sering menemui gejala hambatan [10]. Sehingga dapat mengetahui prioritas kegiatan yang diusulkan oleh instansi terkait dan juga dapat menyesuaikan dari anggaran yang diperlukan sehingga membutuhkan musyawarah dari dari tiap Dusun yang mungkin dapat menyalurkan inspirasi dari masyarakat.

Saat ini proses Musrenbang di Desa Baebunta dilakukan dengan mengambil data dari tiap dusun dan data tersebut akan dicatat ke dalam pembukuan yang masih manual. Akan tetapi, petugas masih kesulitan dalam mengetahui informasi program kerja yang akan dimasukkan dalam proses musrenbang dalam bentuk yang lengkap. Selain itu, pengumpulan data juga menjadi masalah yang sering terjadi dalam pengolahan dokumen karena masih dilakukan secara manual.

Salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan teknologi informasi adalah dengan membangun sebuah sistem yang menampung rencana program kerja dari setiap dusun yang akan dihadapkan dalam forum musrenbang tingkatan Desa agar dapat menjadi acuan untuk menentukan program kerja prioritas yang akan di masukkan dalam Musrenbang Kecamatan. Maka pada penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi perencanaan program kerja Desa berbasis web di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah petugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti di atas sehingga informasi mengenai program kerja di Desa Baebunta dapat tersampaikan atau di informasikan kepada masyarakat agar dapat terciptanya transparansi dalam pengelolaan program kerja yang sedang berlangsung.

II. Metode

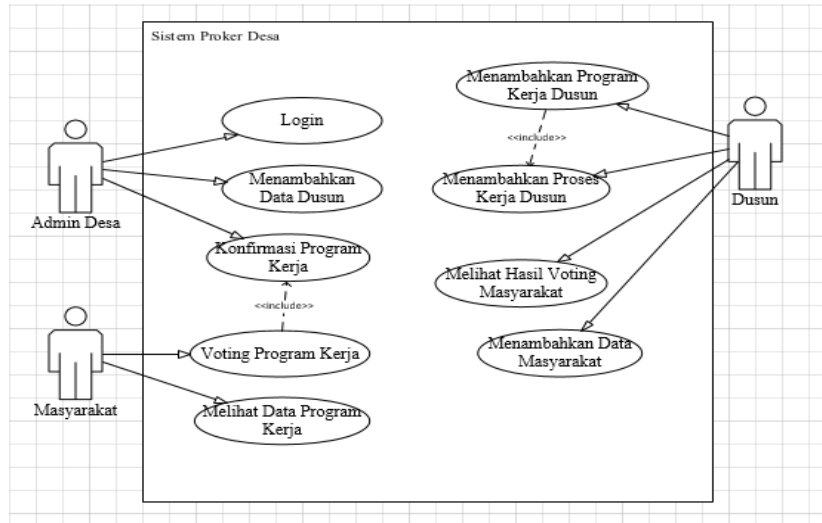
Dari sistem yang di usulkan akan di bangun sistem yang mempermudah petugas untuk menyelesaikan pembukuan-pembukuan data serta program kerja sehingga informasi mengenai program kerja di Desa Baebunta dapat tersampaikan atau di informasikan kepada masyarakat agar dapat terciptanya transparansi dalam pengelolaan program kerja yang sedang berlangsung.



Gambar 1. Sistem yang diusulkan

Dari gambar 1, kita dapat melihat bahwa masyarakat dapat melakukan voting program kerja sehingga terjadi transparansi dalam pengolahan program kerja. Untuk memulai sebuah program kerja, dusun akan menambahkan usulan program kerja. Setelah itu, masyarakat akan melakukan voting program kerja melalui sistem yang dibuat. Dari hasil voting program kerja, dusun dapat menentukan program kerja yang akan dilaksanakan. Setelah menentukan program kerja, dusun harus melakukan konfirmasi pada program kerja agar

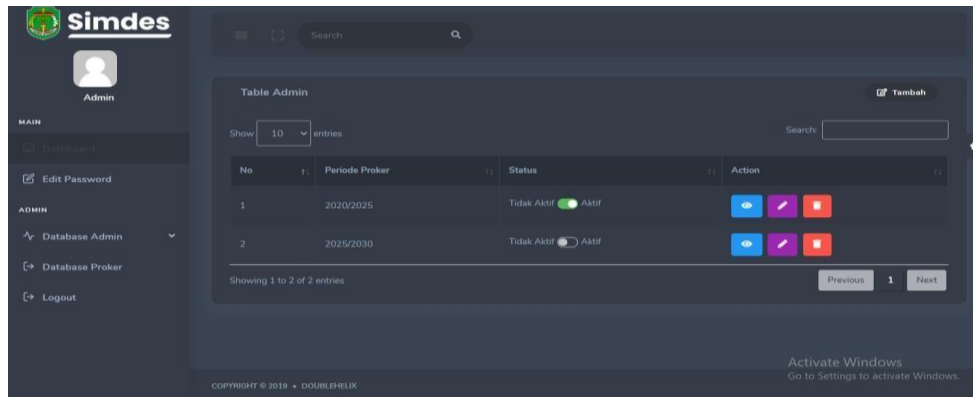
masyarakat dapat melihat program kerja apa saja yang akan segera dilaksanakan. Adapun *use case diagram* dari sistem yang dibuat dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Use Case Diagram

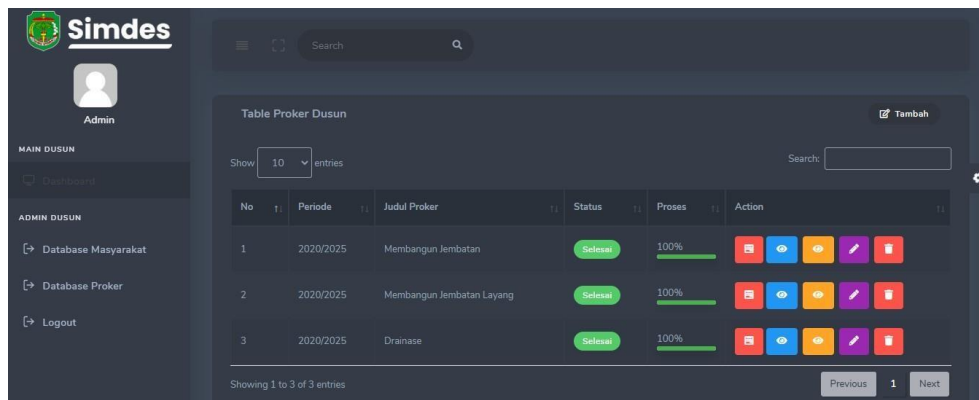
III. Hasil dan Pembahasan

Kami telah membuat sebuah aplikasi yaitu Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web berdasarkan rancangan pada bagian metode. Adapun tampilan halamnya aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 3 sampai gambar 6.



Gambar 3. Halaman periode proker

Pada Gambar 3, halaman ini merupakan tampilan halaman data periode proker, pada halaman ini admin dapat memasukkan tahun periode proker yang akan di kerjakan.



Gambar 4. Halaman proses proker

Pada Gambar 4, halaman ini merupakan tampilan halaman data proker dusun, pada halaman ini dusun menampilkan proker yang akan di kerjakan pada dusun tersebut serta menampilkan hasil progress program kerjanya.

No	Judul Proker	Periode Proker	Status Proker	Proses	Action
1	Membangun Jembatan	2020/2025	Selesai	100%	[Action Icons]
2	Membangun Jembatan Layang	2020/2025	Selesai	100%	[Action Icons]

Gambar 5. Halaman arsip proker

Pada Gambar 5, halaman ini merupakan tampilan halaman data arsip proker, pada halaman ini admin dapat melihat progress proker yang telah di laksanakan.

No	Total Setuju	Total Tidak Setuju
1	1	0

Gambar 6. Form total voting

Pada gambar 6, halaman ini merupakan tampilan halaman data total voting. Admin dapat melihat total voting untuk mengetahui jumlah masyarakat yang setuju dengan tidak setuju pada program kerja pada dusun tersebut.

IV. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem ini dapat membantu masyarakat untuk melihat kinerja progress dari program kerja yang akan di bangun di dusun tersebut. Sistem yang di bangun juga dapat mengelola data program kerja sehingga program kerja yang di kerjakan dapat berjalan maksimal. Sistem ini di lengkapi sistem voting sehingga membuat masyarakat menyampaikan apsirasinya mengenai program kerja yang akan di buat untuk memajukan dan mensejahterahkan dusun agar berkembang lebih maju.

Daftar Pustaka

- [1] Faisal and A. H. Nasution, "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia," *J. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 206–215, 2016.
- [2] S. Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013," *J. Polit. Profetik*, vol. 1, no. 1, p. 2013, 2013, doi: 10.24252/jpp.v1i1.1621.
- [3] A. F. Fanani, W. Astutik, D. Wahyono, and Suprpto, "ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA," *J. Dialekt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [4] J. S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of

- Authority to Village in the Context of Regional Autonomy),” *J. Legis. Indones.*, vol. 13, no. 1, pp. 73–84, 2016.
- [5] G. N. Effendi, Yuliatin, and T. E. K. Lestiyani, “HUBUNGAN ANTARA MUSRENBANGDES DAN RKPDES,” *Repos. UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 2018.
- [6] E. N. Habibah, R. Zuthfiah, Fitriyati, F. Rachmad, A. Listianingrum, and R. Mahendrado, “Collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat rt/rw(Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar ...,” *J. Mhs. Adm. Negara*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [7] Ismiyana, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DONGKALAEA KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN,” *REZPUBLICA*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2018.
- [8] Z. Hirawan, “Efektivitas Musrenbang dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang,” *J. Adm. Publik UNTIRTA*, vol. 5, no. 2, pp. 216–231, 2014.
- [9] B. Sujendra, “APLIKASI GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHKECAMATAN DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA,” *J. Penelit. dan Pengemb. Pelayanan Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 38–45, 2017.
- [10] I. Ariza, “Perancangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya,” *JUSTIN J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 3, 2014.